

Analisis Ketersediaan dan Penggunaan Pupuk untuk Usaha Pertanian Padi di Jawa

Nizwar Syafa'at
Nyak Ilham
Ketut Dewa Sadra
Rachmat Hendrayana

Abstract

The objective of this research is to evaluate the availability of the fertilizers from the second line to the small distributor and the use of the fertilizer in the farming based on the SK Menperindag No 93/MPP/Kep/3/2001. Perception about the effectivity and benefit of the many kind of fertilizer for the paddy productivity also evaluated. Data are from three province (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) both primary and secondary. Two Kabupatens are chosen from each province which one has higher and the other has lower productivity than province average. Data and Information using the Rapid Rural Appraisal (RRA) method which analyzed with the descriptive statistics. Some conclusion found are: (1) the decision of the Menperindag is quite effective to derive the availability of fertilizer to the small distributor level, (2) one of the reason of the decrease of the paddy productivity is the using of imbalance fertilizer, which is caused by the relative price of the fertilizers, (3) If the price of the fertilizer below the parity price, the force of the illegal export of the fertilizer increase, (4) because the high price of the fertilizer SP-36, the farmer will reduce the using of that, caused the low of purchasing power parity.

Kata Kunci: Pupuk – Distribusi - Tanaman padi

Key Word: Fertilizer – Distribution -Paddy

1. PENDAHULUAN

Sejak bulan Desember 1998, pemerintah menerapkan kebijakan liberalisasi pasar pupuk dan menghapus subsidi berbagai jenis pupuk. Selama tahun 1999-2000, tidak ada permasalahan serius mengenai pupuk sehingga produksi padi nasional tetap mengalami peningkatan. Namun pada akhir tahun 2000, muncul kelangkaan pupuk urea di tingkat petani, padahal produksi urea tidak mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya alokasi ekspor pupuk urea pada periode tersebut karena harga di pasar dunia lebih tinggi dibanding pasar domestik. Fenomena tersebut merupakan hal yang wajar sesuai dengan mekanisme pasar.

Untuk menjamin pengadaan dan kelancaran distribusi pupuk urea di dalam negeri, maka pemerintah (melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan) mencabut Surat Keputusan (SK) No.26/MPP/Kep/1/1999, dan mengeluarkan SK baru Nomor 93/MPP/Kep/3/2001, tanggal 14 Maret 2001, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk urea untuk sektor pertanian. Distribusi pupuk urea berdasarkan SK baru tersebut dikendalikan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Unit Niaga PT Pusri dan atau produsen melaksanakan pengadaan pupuk urea sampai Lini III.
2. Unit Niaga PT Pusri dan atau produsen melaksanakan penjualan pupuk urea di gudang Lini III kepada distributor.
3. Distributor melaksanakan penjualan pupuk urea dari gudang Lini III ke pengecer di Lini IV.
4. Pengecer melaksanakan penjualan pupuk urea di Lini IV kepada petani.

Dengan sistem distribusi pupuk urea sampai Lini III, maka peluang swasta melakukan penyelundupan ekspor pupuk urea menjadi kecil karena swasta harus mengeluarkan biaya transportasi dari lini III ke pelabuhan ekspor, sehingga perbedaan harga FOB (*Free on Board*) antara pasar domestik dengan pasar dunia menjadi kecil. Dengan kebijaksanaan tersebut diharapkan petani tetap dapat menggunakan pupuk urea sesuai dengan rekomendasi.

Produksi pupuk urea nasional sekitar 5,75 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri sebesar 4,00 juta ton, sehingga terdapat sisa produksi sebesar 1,75 juta ton untuk ekspor. Ada lima produsen pupuk Urea, yaitu: PT. Pusri, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang tergabung dalam suatu *Holding Company*. Pupuk urea untuk alokasi ekspor dihasilkan oleh *Aceh Asean Fertilizer (AAF)* yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh Utara. Dengan kondisi liberalisasi pasar pupuk dan adanya surplus pupuk urea, maka peluang terjadinya kelangkaan ketersediaan pupuk urea di pasar domestik sangat besar, apabila disparitas harga pasar dalam negeri dengan pasar luar negeri cukup besar, karena hal tersebut akan mendorong ekspor. Dengan argumentasi pentingnya keterjaminan ketersediaan dan stabilitas harga pupuk urea di pasar domestik, maka diperlukan kebijakan pengendalian pupuk urea.

Produksi pupuk SP-36 dan ZA yang dihasilkan oleh PT Petrokimia Gresik. masing-masing hanya sekitar 1,0 dan 0,7 juta ton, ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor. Sementara itu kebutuhan pupuk KCl seluruhnya dipenuhi dari impor (Swastika, dkk. 1999). Dengan kondisi liberalisasi pasar pupuk dan terjadinya defisit serta dengan keterbatasan pengendalian terhadap pasar SP-36 dan ZA, maka untuk sampai saat ini pasar kedua jenis pupuk tersebut diserahkan sesuai mekanisme pasar.

Produksi padi tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 4,45 persen dibanding tahun 2000 (BPS, 2002) yang disebabkan oleh penurunan luas panen maupun penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas diduga antara lain disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pupuk dan melemahnya daya beli petani, sehingga mereka tidak dapat menggunakan pupuk sesuai rekomendasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi ketersediaan berbagai jenis pupuk dan penggunaannya di tingkat petani.

Berikut ini adalah evaluasi tentang ketersediaan dan penggunaan pupuk di tingkat petani pada usahatani padi. Secara lebih rinci, tujuan kajian ini adalah: mengevaluasi ketersediaan berbagai jenis pupuk dari Lini II sampai pengecer dan penggunaannya di tingkat petani serta untuk mengetahui persepsi petani tentang manfaat dan efektivitas dari berbagai jenis pupuk dalam meningkatkan produktivitas padi.

Penelitian ini dilakukan di tiga propinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tiap propinsi dipilih masing-masing dua kabupaten sentra produksi padi yang memiliki tingkat produktivitas berbeda, yaitu satu kabupaten memiliki tingkat produktivitas di atas rata-rata propinsi dan kabupaten lainnya dengan produktivitas di bawah rata-rata propinsi. Di tiap kabupaten ditentukan satu kecamatan dan dari kecamatan tersebut diambil dua desa yang mewakili kabupaten tersebut. Secara rinci lokasi kajian disajikan dalam Tabel 1. Data dan informasi dikumpulkan dengan metoda *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dari berbagai instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan tingkat propinsi dan kabupaten, Kantor Pemasaran Pusri Propinsi (PPD) dan Kabupaten (PPK), distributor dan pengecer pupuk, serta kelompok tani di dua kabupaten contoh. Pengumpulan data dilakukan antara minggu ketiga dan keempat bulan Februari 2002.

Analisis data primer dan sekunder dilakukan secara deskriptif dengan teknik tabulasi silang. Untuk mengetahui efisiensi sistem pemasaran pupuk dilakukan analisis margin keuntungan. Ketersediaan pupuk pada lini pemasaran vertikal dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan indikatif.

Tabel 1
*Lokasi Penelitian Ketersediaan dan Penggunaan Pupuk
Untuk Usahatani Padi, 2002.*

Propinsi	Kabupaten
Jawa Barat	1. Subang 2. Garut
Jawa Tengah	1. Boyolali 2. Purworejo
Jawa Timur	1. Lamongan 2. Bojonegoro

2. BEBERAPA TEMUAN POKOK

2.1. Pola Pemasaran dan Ketersediaan Pupuk

Sejak bulan Desember 1998 pasar pupuk dalam negeri diliberalisasi, dimana swasta bebas berperan dalam memasarkan pupuk asal impor. Pemasaran pupuk produksi dalam negeri tidak lagi dimonopoli oleh PT. PUSRI tetapi dilakukan oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam Holding Company (PT. Pusri, PT. Petro Kimia, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Kaltim).

Pada awal pemberlakuan kebijakan tersebut (tahun 1999) telah terjadi perkembangan yang positif, yaitu: (a) di lini IV telah terjadi persaingan yang sehat dengan meningkatnya jumlah penyalur-penyalar swasta yang dapat membeli pupuk langsung dari lini II/III; (b) harga pupuk lebih stabil dan bahkan lebih murah dari harga referensi; (c) KUD yang semula memonopoli penyaluran pupuk di lini IV tidak dapat bersaing dengan penyalur-penyalar swasta yang lebih besar dan lebih efisien.

Dengan kebebasan tersebut dan disertai disparitas harga urea dimana harga di pasar dunia lebih tinggi dibanding harga di pasar domestik, telah mendorong PT. PUSRI meningkatkan ekspor urea yang kemudian mengakibatkan kelangkaan urea di pasar domestik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kepmen Perindag No 93 tahun 2001 menugaskan PT. PUSRI sebagai *Holding Company* untuk memenuhi kebutuhan urea dalam negeri terlebih dahulu dengan mengurangi alokasi pupuk untuk ekspor dan melakukan pengendalian distribusi urea. Kebijakan tersebut telah mendorong ketersediaan pupuk lebih merata distribusinya dan mengurangi fluktuasi harga, sehingga petani mampu menggunakan pupuk Urea sesuai dengan dosis yang dianjurkan.

Di pihak lain, kebijakan tersebut telah mengurangi kesempatan meraih keuntungan bagi PT. PUSRI karena harga Urea di pasar luar negeri lebih mahal. Pada bulan Desember 2001, harga Urea untuk ekspor US\$ 119/ton (FOB), sedangkan urea untuk pasar dalam negeri sekitar US\$ 76,8/ton. Kebijaksanaan tersebut juga dipandang kurang menguntungkan bagi pedagang karena menambah biaya pemasaran berupa biaya gudang dan transportasi dari lini III ke penyalur/pengecer. Namun

demikian, secara umum margin keuntungan distributor dan pengecer pupuk urea masih lebih tinggi dibanding pupuk lainnya, karena biaya pengangkutan dan penyimpanan pupuk urea lebih efisien mengingat volume yang diperdagangkan cukup besar (Tabel 2).

Tabel 2

Margin Keuntungan Pedagang Berbagai Jenis Pupuk di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, 2002 (%).

Pelaku Ekonomi/ Jenis Pupuk	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
1. Distributor			
- Urea	1,85	0,47	0,47
- SP36	0,59	0,91	0,33
- ZA	2,05	2,10	0,47
- KCl	1,55	2,68	-
2. Pengecer			
- Urea	2,11	2,04	-
- SP36	1,08	1,30	0,97
- ZA	1,99	2,51	3,95
- KCl	2,06	12,13	-

Berdasarkan besarnya margin keuntungan (Tabel 2), dapat dikatakan bahwa secara umum sistem pemasaran pupuk sudah efisien. Besarnya margin keuntungan untuk pupuk Urea berkisar antara 0,47 – 2,11 persen; untuk pupuk SP-36 antara 0,33 - 1,30 persen; untuk pupuk KCl antara 1,55 – 2,68 persen, dan untuk pupuk ZA antara 0,47 - 3,95 persen. Walaupun demikian, masih dijumpai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan distribusi pupuk yaitu: Pertama, distributor tertentu masih dapat membeli pupuk Urea, SP36 dan ZA dari lini II, sedangkan distributor lain hanya dapat membeli pupuk pada lini III. Hal tersebut telah menyebabkan perbedaan harga jual antar distributor. Kedua, importir tertentu diwajibkan melakukan impor pupuk KCl secara rutin untuk menjaga ketersediaan pupuk secara berimbang, padahal permintaan pupuk KCl sangat terbatas, sehingga perputaran modal lambat dan stok di gudang meningkat. Dengan demikian, importir atau pedagang kurang berminat memperdagangkan pupuk KCl.

Volume pemasaran empat jenis pupuk (Urea, SP36, ZA, dan KCl) melalui PPD dan PPK di tiga propinsi contoh antara tahun 1997-2001 mengalami penurunan. Penurunan paling tajam terjadi pada pupuk SP36 di Jawa Barat dan

Jawa Tengah, masing-masing dari 133.151 ton dan 115.978 ton pada tahun 1997 menjadi 10.731 ton dan 2.512 ton pada tahun 2001 (Tabel 3). Penurunan volume penyaluran tersebut memberikan indikasi penurunan dosis penggunaan pupuk di tingkat petani. Namun demikian, gejala tersebut disebabkan pula oleh peningkatan jumlah pelaku pemasaran pupuk yang menjual berbagai jenis pupuk alternatif.

Tabel 3

Volume Penyaluran Berbagai Jenis Pupuk di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, 1997 - 2001 (ton).

Jenis Pupuk	Tahun				
	1997	1998	1999	2000	2001
1. Jawa Barat					
Urea	540.000	811.514	615.196	542.602	504.377
SP36	133.151	194.763	93.448	30.144	10.731
ZA	44.384	54.101	38.936	12.058	10.731
KCl	22.192	21.640	31.149	18.087	10.731
2. Jawa Tengah					
Urea	598.285	787.025	572.252	554.027	578.357
SP36	115.978	167.647	78.084	29.753	2.512
ZA	75.610	113.133	65.917	25.215	6.033
KCl	15.951	15.731	20.449	17.099	12.156
3. Jawa Timur					
Urea	412.014	291.375	281.071	347.321	315.363
SP36	885.060	655.365	845.110	598.423	662.933
ZA	524.599	324.641	522.095	540.348	521.689
KCl	-	-	10.774	-	11.132

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan Februari 2001 telah mendorong tingkat ketersediaan berbagai jenis pupuk sampai tingkat pengecer. Namun demikian, kebijaksanaan tersebut akan mendorong penyelundupan pupuk urea karena harga di pasar dunia lebih tinggi dibanding harga di dalam negeri. Kasus mikro di Jawa Barat menunjukkan bahwa petani mengalami kesulitan pupuk Urea, padahal di lini I dan lini II pupuk tersedia, namun distribusinya di lini IV dan di

tingkat petani mengalami hambatan. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya penyelundupan untuk ekspor dari lini I dan lini II yang dipicu oleh perbedaan harga tersebut. Pada kasus lain, kelangkaan pupuk disebabkan oleh masalah teknis angkutan. Misalnya di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menurunnya persediaan pupuk disebabkan oleh masalah kurang lancarnya pasokan pupuk dari pabrik ke distributor maupun pengecer karena tersendatnya angkutan pada Hari Idul Fitri tahun 2001.

2.2. Penggunaan Pupuk dan Daya Beli Petani

Sebelum kebijaksanaan Desember 1998, penggunaan urea di tingkat petani sesuai dengan rekomendasi, tetapi setelah adanya kebijaksanaan Pebruari 2001 penggunaan pupuk Urea justru melebihi dosis yang direkomendasikan (Tabel 4). Di beberapa wilayah penggunaan pupuk Urea di tingkat petani ada yang mencapai 148 persen dari yang direkomendasikan. Tetapi sebaliknya penggunaan pupuk lainnya seperti SP36 dan KCl mengalami penurunan. Penurunan penggunaan pupuk SP36 mencapai 50 persen dan pupuk KCl mencapai 84 persen, bahkan ada petani yang tidak menggunakan pupuk KCl. Bila dibandingkan dengan periode sebelum Desember 1998, harga urea relatif murah dibanding harga jenis pupuk lainnya. Setelah periode tersebut perbandingan harga urea dengan pupuk lainnya meningkat namun terus stabil sampai saat ini (Tabel 5). Walaupun demikian, rasio harga gabah terhadap pupuk mengalami penurunan (Tabel 6). Hal ini menunjukkan bahwa daya beli petani terhadap pupuk mengalami penurunan. Dengan ketersediaan biaya untuk pupuk terbatas, maka petani cenderung mengurangi dosis pupuk selain Urea. Hal ini bisa dipahami mengingat dampak penggunaan urea terhadap produksi padi sudah lebih dipahami petani. Selain itu ketersediaan Urea relatif lebih baik dibanding pupuk lainnya.

Penggunaan pupuk Urea di tingkat petani lebih tinggi dibanding pupuk lainnya, sehingga penggunaan pupuk secara keseluruhan menjadi tidak berimbang. Secara agronomis penggunaan pupuk urea yang melebihi dosis rekomendasi menyebabkan pertumbuhan vegetatif/anakan lebih banyak, dan mudah rebah sehingga produktivitas menurun. Pada pertanaman musim penghujan menunjukkan penurunan penggunaan pupuk SP36 dari 87,5 kg menjadi 56 kg per hektar

sedangkan dosis KCI tetap 25 kg/ha telah menyebabkan penurunan produksi dari 7,4 ton menjadi 7,2 ton per/ha. Penurunan produksi juga terjadi pada pertanaman musim kemarau dari 6,2 ton menjadi 6,0 ton per hektar.

Tabel 4
Persentase Penggunaan Pupuk Terhadap Dosis Rekomendasi pada Usahatani Padi Sawah di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, 1998 - 2001 (%).

Jenis Pupuk	Sebelum Des 1998	Des 1998 s/d Feb 2001	Setelah Feb 2001
1. Jawa Barat			
Subang			
Urea	100	100	100
SP36	88	56	56
ZA	54	14	14
KCI	50	50	50
Garut			
Urea	95*)	95*)	95*)
SP36	100	100	100
ZA	-	-	-
KCI	63	63	63
2. Jawa Tengah			
Boyolali			
Urea	100	83	83
SP36	100	133	133
ZA	100	100	100
KCI	100	100	100
Purworejo			
Urea	106	106	117
SP36	87	87	87
ZA	100	-	-
KCI	100	-	-
3. Jawa Timur			
Lamongan			
Urea	100	138	138
SP36	100	50	50
ZA	50	-	-
KCI	50	100	-
Bojonegoro			
Urea	100	150	150
SP36	100	50	50
ZA	50	-	-
KCI	50	-	-

Keterangan : *) menggunakan pupuk Urea tablet

Tabel 5
Rata-Rata Harga Eceran Pupuk di Jawa Barat, Jawa Tengah dan
Jawa Timur, 1997/1998 – 2001/2002 (Rp/kg)

No	Uraian	MH 97/98	MH 98/99	MK 99	MH 99/00	MK 00	MH 00/01	MK 01	MH 01/02
1.	Jawa Barat								
	a. Urea	500	1200	1000	1050	1000	1150	1200	1200
	b. SP-36	770	1700	1700	1400	1400	1500	1600	1600
	c. KCl	1200	1900	1800	1500	1500	1600	1800	1800
	d. ZA	600	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100
	Rasio harga :								
	a. Urea/SP36	0,65	0,71	0,59	0,75	0,71	0,77	0,75	0,75
	b. Urea/KCl	0,42	0,63	0,56	0,70	0,67	0,72	0,67	0,67
	c. Urea/ZA	0,83	1,20	1,00	1,05	1,00	1,05	1,09	1,09
2.	Jawa Tengah								
	a. Urea	492	1100	930	945	1050	1050	1200	1200
	b. SP-36	779	1700	1520	1350	1350	1400	1600	1600
	c. KCl	1000	1900	1800	1450	1500	1600	1800	1800
	d. ZA	500	920	860	900	950	1000	1100	1100
	Rasio harga :								
	a. Urea/SP36	0,63	0,65	0,61	0,70	0,78	0,75	0,75	0,75
	b. Urea/KCl	0,49	0,58	0,52	0,65	0,70	0,66	0,67	0,67
	c. Urea/ZA	0,98	1,20	1,08	1,05	1,11	1,05	1,09	1,09
3.	Jawa Timur								
	a. Urea	746	1150	1080	980	1000	1050	1200	1200
	b. SP-36	778	1800	1600	1500	1500	1500	1600	1600
	c. KCl	1000	2000	1900	1900	1800	1700	1800	1800
	d. ZA	600	1000	1000	960	960	1000	1050	1050
	Rasio harga :								
	a. Urea/SP36	0,96	0,64	0,67	0,65	0,67	0,70	0,75	0,75
	b. Urea/KCl	0,75	0,58	0,57	0,52	0,56	0,62	0,67	0,67
	c. Urea/ZA	1,24	1,15	1,08	1,02	1,04	1,05	1,14	1,14

Sumber: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (2001)

Tabel 6

Rasio Harga Gabah terhadap Harga Pupuk di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, 1998 - 2001.

Jenis Pupuk	Sebelum Des 1998	Des 1998 s/d Feb 2001	Setelah Feb 2001
1. Jawa Barat*)			
Subang			
Urea	2,10	0,80	1,00
SP36	1,30	0,60	0,70
ZA	1,30	1,00	1,00
KCl	0,60	0,50	0,60
Garut			
Urea	2,12	1,32	1,22
SP36	1,29	0,86	0,90
ZA	1,80	1,33	1,22
KCl	0,62	0,88	1,04
2. Jawa Tengah			
Boyolali			
Urea	1,00	0,67	0,75
Purworejo			
Urea	1,67	0,87	0,92
Jawa Timur			
Lamongan			
Urea	1,75	1,10	0,86
SP36	0,54	0,72	0,56
KCl	0,44	0,61	0,47
Bojonegoro			
Urea	1,56	1,10	0,76
SP36	1,04	0,78	0,56
KCl	1,84	0,64	0,50

Untuk mengatasi ketimpangan penggunaan pupuk tersebut, perlu dilakukan penyesuaian harga berbagai jenis pupuk. Oleh karena daya beli petani makin menurun, maka penyesuaian sebaiknya dilakukan ke arah penurunan harga SP-36 dan diikuti dengan peningkatan harga Urea. Penyesuaian harga tersebut dapat dilakukan oleh PT PUSRI sebagai *Holding Company* dengan cara pengalihan subsidi perusahaan terhadap Urea kepada SP-36.

2.3. Persepsi Petani Tentang Manfaat Pupuk

Dalam menggunakan pupuk, petani bertindak selektif yang didasarkan atas pengalaman empiris di lapangan. Di lapangan, muncul fanatisme petani terhadap salah satu jenis pupuk, terutama Urea. Petani Jawa Barat fanatik menggunakan pupuk Urea Kujang sedangkan di Jatim terhadap Urea PUSRI. Meskipun petani mengetahui peran dari masing-masing jenis pupuk akan tetapi petani cenderung menggunakan pupuk Urea lebih banyak dibanding pupuk lainnya, karena manfaat pupuk Urea sudah lebih dikenal petani.

Sejak deregulasi bulan Desember 1998 banyak beredar pupuk alternatif. Pupuk alternatif yang dikenal petani sangat beragam antara lain SP27, SP 30, SP Banteng, Doupos, Agro 88, NPK Jempol, NPK cap Tawon, NPK cap Kuda, NPK Tani, Pupuk Tablet coklat, Agro casio, Kascing, dan lain-lain. Terhadap beredarnya pupuk alternatif, petani pada awalnya memberikan respon positif karena didorong harga yang relatif lebih murah. Akan tetapi setelah mencoba menggunakan selama satu musim tanam, akhirnya petani tidak menggunakannya lagi, karena pupuk-pupuk tersebut hampir tidak ada dampaknya terhadap produktivitas padi.

Keberadaan pupuk alternatif tersebut dapat merugikan petani, karena kandungan hara yang tercantum dalam label kemasan tidak selalu sama dengan kandungan hara sebenarnya. Hasil uji laboratorium terhadap kandungan berbagai hara dari sekitar 25 jenis pupuk, dapat dipilah menjadi tiga kategori, yaitu (a) kandungan haranya lebih tinggi dari label kemasan, (b) kandungan haranya mendekati angka label kemasan, dan (c) kandungan haranya lebih rendah dari angka label kemasan (Tabel 7) Lebih dari 50 persen jenis pupuk yang beredar di pasaran ternyata memiliki nilai kandungan hara yang relatif rendah dari angka kandungan hara yang tertulis dalam label.

Tabel 7

*Keragaman Hasil Analisis Kandungan Unsur Hara 25 jenis Pupuk
di Jawa Timur, 2001*

No.	Jenis hara	Kandungan hara		
		N	P2O5	K2O
a.	Lebih tinggi dari angka tertulis dlm label kemasan (jenis)	6 (24%)	5 (20 %)	5 (20%)
b.	Mendekati angka tertulis dlm label kemasan (jenis)	6(24 %)	6 (24 %)	3 (12%)
c.	Lebih rendah dari angka tertulis dlm label kemasan (jenis)	13 (52%)	14 (56%)	17 (68 %)

Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa timur, 2001

Dengan kandungan haranya relatif rendah dari angka yang tertulis dalam label kemasan, sebenarnya petani telah membeli pupuk per satuan unit hara yang relatif lebih mahal dari nilai sebenarnya. Disamping itu dampaknya terhadap peningkatan produktivitas juga tidak ada, bahkan dari beberapa pengalaman petani yang menggunakan pupuk alternatif menyatakan produktivitasnya relatif rendah. Karena itu petani tidak lagi tertarik untuk menggunakan pupuk alternatif tersebut.

3. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan Februari 2001, cukup efektif dalam mendorong ketersediaan pupuk berbagai jenis sampai tingkat pengecer. Namun dengan harga Urea yang berada di bawah harga paritasnya, dapat mendorong penyelundupan Urea ke pasar dunia.

Penggunaan pupuk yang tidak berimbang turut menyebabkan penurunan produktivitas padi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong petani menggunakan pupuk berimbang melalui penyesuaian harga berbagai jenis pupuk. Mengingat unsur makro yang banyak dibutuhkan tanaman adalah Urea dan Posphat, maka perlu dilakukan upaya penyesuaian harga Urea dengan SP-36. Ada dua opsi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah yaitu: *Pertama*, menyesuaikan harga Urea dan SP-36 sesuai dengan harga paritasnya dan *Kedua*, menyesuaikan harga urea dan SP-36 pada tingkat harga di bawah harga paritas impornya.

Kebijakan penyesuaian harga Urea dan SP-36 sesuai dengan harga paritas impornya mempunyai beberapa keunggulan yaitu: (1) menghindari penyelundupan sehingga penyediaan pupuk dalam negeri lebih terjamin; (2) mengurangi pemborosan penggunaan pupuk urea di tingkat petani karena harganya lebih mahal; (3) meningkatkan keuntungan PT PUSRI. Sedangkan kelemahannya adalah harga pupuk menjadi lebih mahal sehingga dapat terjadi penurunan penggunaan pupuk pada dosis yang lebih rendah dari yang direkomendasikan.

Kebijakan penyesuaian harga Urea dan SP-36 pada tingkat di bawah harga paritas impornya mempunyai keunggulan: (1) penggunaan pupuk berimbang akan lebih mudah terealisasi; (2) keuntungan PT PUSRI sebagai *Holding Company* mungkin tidak mengalami perubahan karena penurunan harga pupuk SP-36 dikompensasi dengan kenaikan harga pupuk Urea. Sedangkan kelemahannya adalah: (1) kemungkinan penyelundupan pupuk urea dan SP-36; (2) penyediaan SP-36 tidak terjamin karena harga impornya lebih tinggi dibanding harga pasar dalam negeri.

Untuk pupuk KCL, karena hara kalium penggunaannya lebih sedikit, maka kebijaksanaannya dapat diteruskan sesuai dengan mekanisme pasar. Upaya peningkatan penggunaan pupuk KCL dapat dilakukan melalui penyuluhan, yang lebih intensif. Sedangkan penyediaannya dapat dilakukan oleh swasta maupun PT PUSRI.

Saat ini banyak beredar pupuk alternatif dengan harga yang lebih murah. Namun kenyataannya kandungan hara pupuk alternatif tersebut lebih rendah dari yang tercantum pada label, sehingga petani sesungguhnya mengalami kerugian. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi petani, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat tentang perizinan dan perdagangan industri pupuk non makro tunggal dan pupuk alternatif. Semua kelompok pupuk non konvensional tersebut yang akan dipasarkan harus diuji isi kandungan hara dan efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas tanaman.

Selain kebijaksanaan harga, penyuluhan tentang pemupukan berimbang perlu terus diintensifkan. Hal ini perlu disertai dengan pembuatan peta-peta kandungan hara tanah pada wilayah yang lebih luas.

4. DAFTAR PUSTAKA

- BPTP, (2001). *Acuan Rekomendasi Pemupukan Spesifik Lokasi untuk Padi Sawah di Jawa Timur*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur.
- Ilham, N., (2001). Dampak Kebijakan Tataniaga Pupuk Terhadap Peran Koperasi Unit Desa Distributor Pupuk. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Vol.1 No.3 : 218 – 226 (Juli 2001) Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Denpasar.
- Kariyasa, K. Dan M.O. Adnyana, (2001). *Dampak Kebijaksanaan Desember 1998 Terhadap Tataniaga Pupuk di Nusa Tenggara Barat dalam Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke depan* (I Wayan Rusastra et al ed). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Swastika, D.K.S, Sumaryanto, Nyak Ilham, dan Ade Supriatna, (1999-a). Respon Petani Terhadap Kebijaksanaan Penghapusan Subsidi Pupuk dan Kebijakan Harga Dasar Gabah. Dalam Analisis dan Perspektif Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi. Penyunting : T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, dan E. Jamal. *Monograph Series No.20*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Swastika, D.K.S., Nyak Ilham, dan Ade Supriatna, (1999-b). Pengadaan dan Distribusi Pupuk Pasca Deregulasi Kebijaksanaan Desember 1998. Dalam Analisis dan Perspektif Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi. Penyunting : T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, dan E. Jamal. *Monograph Series No.20*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- _____. (2001). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.93/Nop/Kep.3/2001 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Untuk Sektor Pertanian.
- _____. (2001). *Pengawasan dan Analisis Rutin Pupuk Alternatif di Jawa Timur 2001*. Laporan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.
- Tukmin, (2001). *Penerapan Pupuk Berimbang Kebijakan Pemerintah dan Hambatan Serta serta Permasalahannya*. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur. ■